

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

- a. Dalam pembuatan kebijakan LCGC di Indonesia terdapat pihak-pihak yang terlibat diantaranya yaitu Presiden SBY selaku pencetus kebijakan, Kementrian Perindustrian selaku pembuat kebijakan, Kementrian Keuangan selaku perumus keuangan dalam pembuatan kebijakan, GAIKINDO selaku pemilik modal besar yang digandeng oleh kementrian perindustrian sebagai produsen mobil internasional, dan ASIA NUSA selaku produsen mobil nasional di Indonesia.
- b. Dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan LCGC di Indonesia terdapat pihak yang pro terhadap kebijakan dan ada pihak yang kontra terhadap kebijakan. Dimana pihak yang pro terhadap kebijakan LCGC adalah Presiden SBY, Kementrian Perindustrian, Kementrian Keuangan, dan GAIKINDO. Sedangkan pihak yang kontra terhadap kebijakan yaitu ASIA NUSA. Alasan ASIA NUSA menolak Kebijakan LCGC dikarenakan akan membuat perusahaan mobil nasional tidak dapat bersaing dengan perusahaan merek internasional dan dikhawatirkan akan membuat perusahaan mobil nasional akan bangkrut karena tidak mampu bersaing.
- c. Walaupun ASIA NUSA tetap menolak kebijakan LCGC yang dikhususkan untuk mobil pribadi, Kebijakan LCGC di Indonesia tetap dijalankan

dengan adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energy dan harga terjangkau. Dengan demikian pertarungan oleh antara GAIKINDO dan Asia Nusa di menangkan oleh GAIKINDO dikarenakan pemerintah lebih mementingkan pemilik modal besar dari pada perusahaan mobil nasional. Maka dari itu pemerintah mengalihkan tujuan awal dari kebijakan LCGC untuk masyarakat pedesaan ke arah mobil pribadi bersifat komersil.

#### **IV.2. Saran**

Dalam kebijakan LCGC diharapkan akan mempunyai dampak yang baik bagi Negara dan masyarakat Indonesia. Dan juga membuat perusahaan mobil nasional berjaya dirumah sendiri. Kekliruan yang terjadi pemerintah hanya ramah kepada pemilik modal besar dan kejam kepada perusahaan yang tak punya apa-apa demikian pula dengan kebijakan LCGC seharusnya jika ingin membangun kemandirian di bidang otomotif seharusnya mendukung dan memperhatikan perusahaan asli anak bangsa dan mendorong agar perusahaan dalam negeri mampu menjadi perusahaan besar dan bersaing dengan perusahaan merek internasional bukan baik kepada pemilik modal, jika perubahan sikap pemerintah seperti ini akan membuat perusahaan mobil nasional sampai kapanpun tidak akan pernah bisa berkembang dan bersaing. Jika ingin Negara ini maju maka dukunglah yang menjadi asset anak bangsa dan kemudian dukung dan

kembangkan cita-cita menjadi Negara maju yang selama ini menjadi hal yang mimpi akan berubah menjadi kenyataan.